

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsumsi

2.1.1.1 Pengertian Konsumsi

Menurut Dumairy (2004) dalam Zarkasi et al., (2021) menyatakan bahwa pada pengeluaran konsumsi masyarakat "*consumption*" (C) merupakan suatu pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang dan jasa ntuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang melakukan pembelanjaan yang disebut dengan pendapatan yang dibelanjakan. Menurut Drahan Bannoch dalam Zarkasi et al., (2021) menyatakan bahwa "konsumsi yaitu pengeluaran total untuk mendapatkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak terbatas hanya pengeluaran untuk barang-barang yang tidak tahan lama, tetapi juga meliputi pengeluaran untuk barang-barang tahan lama (*durable goods*)".

2.1.1.2 Pendapatan Nasional

Menurut Dumairy et al. (2018), pendapatan nasional merupakan nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu negara dalam satu periode tertentu. Salah satu metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), yaitu dengan

menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pada perekonomian terbuka, identitas pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Di mana:

Y = Output atau pendapatan nasional

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama pembentuk pendapatan nasional. Oleh karena itu, perubahan konsumsi rumah tangga akan memengaruhi aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah membiayai pengeluarannya melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dapat dinyatakan sebagai pengeluaran pemerintah bersih (*net government expenditure*), yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Dengan demikian, identitas pendapatan nasional dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + (G - T) + (X - M)$$

dengan:

T = Penerimaan pajak.

Karena penelitian ini berfokus pada konsumsi rumah tangga sebagai variabel dependen, maka persamaan tersebut dapat diturunkan menjadi:

$$C = Y - I - (G - T) - (X - M)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai komponen pembentuk PDB. Dalam konteks penelitian ini, komponen $(G-T)$ menggambarkan peran kebijakan fiskal, sedangkan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga melalui perubahan pendapatan yang dapat dibelanjakan (*disposable income*) dan daya beli masyarakat.

2.1.1.3 Teori Konsumsi

1. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Keynes menyatakan bahwa pengeluaran untuk barang dan jasa saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Menurut Keynes, bahwa ada jumlah minimum belanja yang harus dilakukan, tergantung dari berapa banyak pendapatan. Ini berarti bahwa orang tetap harus mengeluarkan uang meskipun pendapatannya nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus (*autonomous consumption*). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar pendapatan disposabel.

$$C = C_0 + b Y_d$$

Di mana:

C = konsumsi

C_0 = besarnya konsumsi saat pendapatan nol (konsumsi otonomus)

b = besarnya tambahan konsumsi yang disebabkan oleh tambahan pendapatan / *Marginal Propensity to Consume* (MPC)

Y_d = pendapatan disposabel (pendapatan yang siap dibelanjakan)

Pendapatan disposabel merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak, yang dirumuskan sebagai:

$$Y_d = Y - T$$

Sehingga fungsi konsumsi dapat dirumuskan menjadi:

$$C = C_0 + b (Y - T)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional serta pajak. Ketika pendapatan meningkat (yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi), konsumsi cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika pajak meningkat, pendapatan disposabel menurun sehingga konsumsi cenderung menurun.

Dalam teorinya, Keynes mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi utama dalam konteks makroekonomi, yaitu:

- a. Kecenderungan mengonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume*/ MPC), merupakan jumlah konsumsi yang dihabiskan dalam setiap

tambahan pendapatan yang berkisar antara nol dan satu, atau dapat disederhanakan dengan rumus $0 \leq MPC \leq 1$.

$$MPC = \frac{\Delta c}{\Delta Y_d}$$

- b. Kecenderungan mengonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume/ APC*), merupakan hasil dari perbandingan antara konsumsi dengan pendapatan *disposable* seseorang. Keynes berpendapatan bahwa *Average Propensity to Consume* akan menurun ketika pendapatan meningkat.

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

- c. Hubungan antara konsumsi dan tabungan atau *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dan *Marginal Propensity to Save* (MPS), bahwa sebagian besar pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh rumah tangga biasanya digunakan untuk konsumsi, dan sisanya dapat disimpan sebagai tabungan.

$$Y_d = C + S$$

Dimana:

$$Y_d = \text{Disposable Income (Pendapatan)}$$

$$C = \text{Consumption (konsumsi)}$$

$$S = \text{Saving (tabungan)}$$

- d. Efek Pengganda atau Multiplier Effect, merupakan suatu proses di mana perubahan dalam pengeluaran agregat akan menyebabkan perubahan yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Konsep ini didasarkan pada kecenderungan mengonsumsi marginal (MPC), di mana setiap tambahan pendapatan akan sebagian dikonsumsi dan menjadi pendapatan bagi pihak lain secara berulang. Besarnya multiplier ditentukan oleh nilai MPC,

sehingga semakin besar MPC, maka semakin besar pula efek pengganda dalam perekonomian.

$$k = \frac{1}{1 - MPC}$$

k = Multiplier (Angka pengganda)

MPC = *Marginal Propensity to Consume*

2. Teori Konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif (*Relative Income Hypothesis*)

Dalam teori ini kemukakan oleh James Duesenberry, yang menjelaskan kembali ketidakseimbangan antara konsumsi dan pendapatan guna memperoleh pemahaman yang lebih mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut. Mengamati faktor-faktor yang ada. Duesenberry dalam Zarkasi et al., (2021) menyatakan bahwa ada dua asumsi yang memengaruhi konsumsi antara lain sebagai berikut:

- a. Selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah *inter dependen*. Yang artinya setiap pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi pada masyarakat sekitarnya (tetangga), maka dari itu lingkungan dapat memengaruhi pengeluaran konsumsi.
- b. Pengeluaran konsumsi adalah Irreversible, yang artinya pada saat penghasilan naik maka pengeluaran akan berbeda dengan pola pengeluaran saat penghasilan mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa

pengeluaran konsumsi seseorang dalam jangka pendek memengaruhi besar dan kecilnya pendapatan yang relatif.

3. Teori Konsumsi dengan hipotesa pendapatan permanen (*Permanen Income Hypothesis*)

Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua yaitu pendapatan permanen (*permanent income*) dan pendapatan sementara (*transitory income*). Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang dapat diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, contohnya seperti gaji dan pendapatan upah. Kemudian dapat juga diartikan sebagai faktor yang menentukan kekayaan seseorang yaitu dari pendapatannya. Kekayaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: kekayaan manusia (*human wealth*) yaitu berupa kemampuan yang ada atau melekat dalam diri manusia seperti keahlian dan pendidikan. Kemudian kekayaan non-manusia (*non human wealth*) yaitu suatu kekayaan berupa fisik seperti barang yang dikonsumsi tahan lama seperti gedung, rumah, dan obligasi (Laily 2013, dalam Zarkasi et al., 2021).

2.1.1.4 Faktor- Faktor yang Memengaruhi Tingkat Konsumsi

Menurut Ekawarna & Fachruddiansyah (2008), menyatakan ada banyak faktor yang memengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi 3, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Ekonomi
 - a. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat konsumsi juga semakin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli beragam kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar. Atau mungkin pola hidup menjadi lebih konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

b. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Kekayaan rumah tangga merupakan kekayaan riil (misalnya rumah, tanah, dan mobil) dan finansial (deposito berjangka, saham, dan surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposabel.

c. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih mahal dibanding dengan biasanya, sehingga memengaruhi Keputusan konsumen untuk mengurangi konsumsinya.

d. Inflasi (*Inflation*)

Inflasi berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rumah tangga karena kenaikan harga barang dan jasa yang secara umum akan menurunkan daya beli. Semakin tinggi inflasi, rumah tangga cenderung mengurangi konsumsi atau menyesuaikan pengeluaran karena pendapatan riil yang dapat dibelanjakan menjadi lebih kecil.

e. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About the future*)

Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya semakin baik, maka mereka akan cenderung lebih siap untuk melakukan pengeluaran konsumsi yang lebih tinggi. Dan jika rumah tangga memperkirakan masa depannya semakin memburuk, mereka cenderung Bersiap-siap dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsinya.

2. Faktor-faktor Demografi (Kependudukan)

a. Jumlah Penduduk

Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin banyak juga total pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga secara keseluruhan.

b. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di suatu negara dapat dilihat dari beberapa pengelompokan, diantaranya: usia (produktif dan tidak produktif), pendidikan (rendah, menengah, dan tinggi), dan wilayah tempat tinggal (kota dan desa). Pengaruh komposisi penduduk terhadap konsumsi diuraikan secara sederhana sebagai berikut:

- 1) Semakin banyak penduduk berusia kerja atau usia produktif (15-64 tahun), maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi, terutama apabila sebagian besar dari mereka mendapat kesempatan kerja yang baik dengan upah yang layak. Hal ini karena semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin besar juga pendapatan yang dihasilkan.
- 2) Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin besar juga konsumsi mereka. Hal ini karena semakin tinggi pendidikan

seseorang atau suatu keluarga, semakin beragam juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan mereka tidak lagi hanya sebatas makan dan minum, tetapi juga mencakup kebutuhan informasi, lingkungan pergaulan yang lebih baik, serta kebutuhan akan pengakuan sosial (eksistensi). Bahkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk kebutuhan pokok seperti makan dan minum.

- 3) Semakin banyak penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan (*urban*), pengeluaran konsumsi juga cenderung meningkat. Karena pada umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

3. Faktor- faktor Non-Ekonomi

Faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat adalah faktor sosial dan budaya. Perubahan pola nilai, kebiasaan, serta cara pandang terhadap gaya hidup dapat mendorong peningkatan konsumsi. Pada kenyataannya, sulit memisahkan faktor-faktor tersebut karena saling berkaitan dan saling memengaruhi, sehingga kelompok berpendapatan rendah juga dapat terdorong untuk berperilaku konsumtif akibat tekanan sosial maupun budaya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Jamaluddin (2011) menjelaskan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro dalam Sabri et al., (2025) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat dari sebagian harta yang dimilikinya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

2.1.2.2 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mustaqiem (2014), teori yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Daya Beli

Teori daya beli memandang pajak sebagai mekanisme pengalihan daya beli dari masyarakat kepada negara. Pemungutan pajak diibaratkan seperti “pompa” yang menyedot daya beli rumah tangga/masyarakat. Selanjutnya, daya beli yang terkumpul tersebut dikelola dan dialokasikan kembali melalui belanja negara untuk pembiayaan pelayanan publik dan upaya peningkatan kesejahteraan bersama.

2. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menekankan bahwa keadilan pengumutan pajak berkaitan dengan kemampuan individu dalam menanggung beban pajak. Dalam teori ini, pajak dipandang wajar karena negara memberikan jasa kepada masyarakat, terutama perlindungan atas jiwa dan harta benda, sehingga warga yang memperoleh perlindungan tersebut berkewajiban berkontribusi melalui pajak. Teori ini mengandung gagasan bahwa besarnya pajak yang ditanggung seseorang harus sebanding dengan daya pikulnya. Daya pikul diartikan sebagai kemampuan ekonomis yang tersisa setelah penghasilan dikurangi pengeluaran yang bersifat mutlak untuk memenuhi kebutuhan primer diri sendiri dan keluarganya. Dengan kata lain, kemampuan membayar pajak ditentukan oleh sisa pendapatan setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014), pajak memiliki 4 fungsi yaitu antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.4 Jenis- jenis Pajak

Menurut Aulia (2025), jenis-jenis pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa merupakan pajak dikenakan pada konsumsi masyarakat untuk setiap barang atau jasa yang ada di Indonesia.

3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan jenis pajak yang dikenakan pada impor barang mewah dan penyerahan barang mewah. Pajak ini diberlakukan pada pengusaha yang menghasilkan barang-barang tersebut dalam wilayah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

4. Bea Materai (BM)

Bea Materai merupakan jenis pajak yang dikenakan pada dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa sesuatu yang ditulis atau tulisan, baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan.

2.1.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.3.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat dengan subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak melekat pada pihak yang bersangkutan dan tidak ditujukan untuk dialihkan kepada orang lain. PPh dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dengan demikian, seseorang atau sebuah badan baru dikenai PPh apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan (Andi, 2015). Menurut Tobing et al., (2022) menyatakan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain-lain.

2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Andi (2015), subjek pajak meliputi:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak yang dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum diganti secara keseluruhan berfungsi menggantikan posisi ahli waris dalam hal perpajakan. Selama warisan masih menjadi satu kesatuan, warisan tersebut menjadi subjek pajak pengganti, sehingga pajak atas penghasilan yang berasal dari harta itu tetap dikenakan. Warisan yang ditinggalkan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri juga, mengikuti status pewarisnya. Setelah warisan selesai dibagikan, kewajiban pajaknya berpindah kepada masing-masing ahli waris. Sebaliknya, warisan yang ditinggalkan oleh orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri dan tidak menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia tidak diperlakukan sebagai subjek pajak pengganti, karena pajak atas penghasilan tersebut tetap melekat pada objeknya, bukan pada warisan yang belum terbagi.

3. Badan

Badan merupakan kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial publik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Pajak (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya disamakan dengan subjek pajak badan. BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

2.1.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Magfirah, dkk (2021: 68) Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan wajib pajak,
 - b) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final,
 - c) Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat norma penghitungan khusus.

2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, tarif Pajak Penghasilan ditetapkan berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

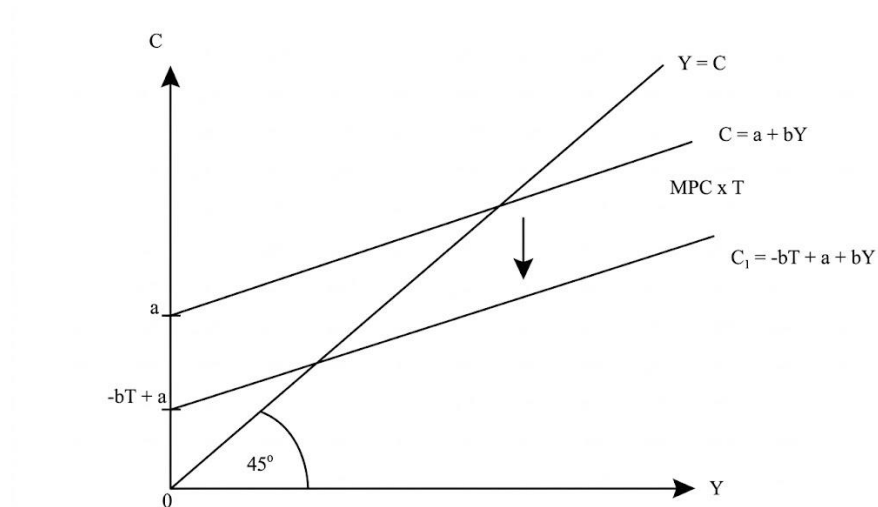
Tabel 2.1 Tarif Umum Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%

Di atas Rp500 juta s.d Rp5 Miliar	30%
Di atas Rp5 Miliar	35%

2.1.3.4 Kurva Pajak

Dalam kerangka ekonomi makro, pajak merupakan variabel yang melekat dalam perhitungan pendapatan disposabel masyarakat.



Sumber: Sukamto & Kurniawati, (2015), diolah kembali

Gambar 2.1 Kurva Fungsi Sebelum dan Setelah Pajak

Berdasarkan Gambar 2.1, fenomena ini dijelaskan melalui pendekatan fungsi keynesian. Pada kondisi awal tanpa pajak, fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan $C = a + bY$. Dalam persamaan tersebut, a merupakan konsumsi otonom, yaitu tingkat konsumsi ketika pendapatan (Y) sama dengan nol, sedangkan b adalah *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yang menunjukkan besarnya tambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan. Pada grafik, garis konsumsi berpotongan dengan sumbu vertikal di titik a , dan kemiringannya ditentukan oleh

nilai b . Titik perpotongan antara garis konsumsi dan garis 45° menunjukkan kondisi keseimbangan, yaitu saat konsumsi sama dengan pendapatan.

Selain itu, pada grafik juga terdapat $Y = C$, yang menunjukkan garis 45° atau garis keseimbangan, yaitu kondisi ketika pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C). Pada setiap titik di garis tersebut berlaku $Y=C$. Berdasarkan identitas pendapatan nasional $Y= C + S$, apabila $Y = C$ maka $S= 0$, yang berarti pada titik tersebut tidak ada tabungan. Apabila pendapatan lebih besar daripada konsumsi ($Y > C$), maka selisihnya merupakan tabungan masyarakat $S = Y - C$.

Ketika pemerintah mengenakan pajak sebesar T , pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat berkurang menjadi $Y - T$. Perubahan ini menyebabkan fungsi konsumsi bergeser dari bentuk awalnya menjadi $C = a + b(Y - T)$. Dalam bentuk tersebut, fungsi konsumsi dapat dinyatakan sebagai $C_1 = -bT + a + bY$. Persamaan ini menunjukkan bahwa intersep fungsi konsumsi tidak lagi sebesar a , melainkan bergeser ke bawah menjadi $-bT + a$. Secara grafis, garis konsumsi setelah pajak bergeser ke bawah secara paralel sebesar bT atau $MPC \times T$, sementara kemiringannya tetap karena nilai *Marginal Propensity to Consume* (MPC) tidak berubah. Pergeseran ini menggambarkan bahwa pada setiap tingkat pendapatan, konsumsi menjadi lebih rendah akibat berkurangnya pendapatan disposabel karena pajak.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) atau Jasa Kena Pajak (JKP), PPN dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Selain itu, PPN juga merupakan pengganti dari pajak penjualan secara umum (Khair et al., 2022). Menurut Supramono (2009) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean).

Menurut Purnomo & Soerjatno, (2021) pajak pertambahan nilai atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, karena pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Sedangkan, menurut Supramono & Damayanti, (2015) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pengumutan pajak tambahan di samping pajak pertambahan nilai atas konsumsi barang. Berbeda dengan PPN yang dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah (BKPTM) atau saat impor BKPTM. Karena hanya dipungut satu

kali pada tingkat pabrikan maka dalam PPnBM tidak dikenal adanya kredit pajak masukan.

2.1.4.2 Teori Pajak Pertambahan Nilai

1. Teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro menyatakan bahwa konsumen berusaha memaksimalkan utilitas atau kepuasan dari konsumsi barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Ketika kenaikan PPN, harga barang dan jasa akan meningkat, menyebabkan garis anggaran konsumen bergeser ke dalam, sehingga kombinasi barang yang dapat dibeli berkurang. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2020), barang dengan elastisitas permintaan yang tinggi seperti kebutuhan sekunder cenderung mengalami penurunan konsumsi yang lebih besar dibandingkan barang kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa ketika PPN meningkat, kelompok masyarakat menengah lebih mungkin mengurangi konsumsi barang non-esensial seperti barang elektronik, perabot rumah tangga, atau hiburan.
2. Teori pendapatan permanen oleh Milton Friedman (1957) memberikan tambahan mengenai perilaku konsumsi. Teori ini menyatakan bahwa konsumsi seseorang lebih dipengaruhi oleh estimasi pendapatan jangka panjang (*permanent income*) daripada fluktuasi pendapatan sesaat. Dalam konteks kenaikan PPN, walaupun pendapatan nominal tidak berubah, kenaikan harga akibat pajak menyebabkan penurunan pendapatan riil, yang dipersepsikan sebagai penurunan daya beli jangka panjang.

2.1.4.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/ jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.1.4.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU PPN yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disebut objek PPN antara lain sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor JKP oleh PKP

2.1.4.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami penyesuaian secara bertahap. Tarif PPN ditetapkan sebagai berikut:

10%	:	Berlaku sebelum perubahan UU HPP
11%	:	Berlaku mulai 1 April 2022
12%	:	Berlaku paling lambat 1 Januari 2025

2.1.5 Inflasi

2.1.5.1 Pengertian Inflasi

Menurut Samuelson (2001) dalam Zarkasi (2015) menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Inflasi (*Inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Venieres & Sebold (1978) dalam Zarkasi (2015), mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus selama periode tertentu. Mankiw (2003) menyatakan bahwa hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, teori inflasi ini bekerja baik dalam jangka panjang.

Definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi ketika kondisi ketidakseimbangan (*disequilibrium*) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Definisi tersebut menunjukkan kondisi dimana kemampuan masyarakat untuk membeli

barang dan jasa menurun, yang diiringi dengan turunnya nilai riil (nilai intrinsik) mata uang suatu negara.

2.1.5.2 Teori Inflasi

1. Teori *Rational Choice*

Teori Pilihan Rasio dikembangkan oleh Gary S. Becker (1976), menyatakan bahwa individu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan rasional untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan (utility), dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, dan alternatif yang tersedia. Mereka diasumsikan memiliki informasi yang sempurna mengenai harga, kualitas, dan manfaat produk, serta melakukan pertimbangan secara logis pada biaya yang dikeluarkan dan manfaat produk yang didapatkan.

Dalam hukum permintaan "Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga barang menurun, maka jumlah yang diminta akan meningkat, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*)". Perilaku konsumsi masyarakat dapat mengalami perubahan ketika terjadi kenaikan harga barang atau ketika kualitas produk tidak lagi memberikan tingkat kepuasan yang diharapkan. Dalam kondisi tersebut, konsumen biasanya akan menyesuaikan pola konsumsinya agar nilai (value) yang diperoleh tetap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ketika harga barang meningkat, masyarakat cenderung mengurangi jumlah pembelian atau beralih ke barang substitusi yang memiliki karakteristik serta manfaat yang relatif sama.

2. Teori Klasik dan Keynesian

Dalam kerangka teori klasik dan Keynesia menyatakan bahwa ketika harga naik lebih cepat daripada kenaikan upah atau pendapatan, pendapatan riil turun, sehingga konsumen harus mengurangi kuantitas atau kualitas konsumsi, berpindah ke barang yang lebih murah, atau menunda pembelian, terutama untuk barang tersier.

3. Teori Kuantitas (*Quantity Theory*)

Teori kuantitas ini merupakan teori tertua yang membahas tentang inflasi. Namun, teori ini dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi dari Universitas Chicago. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai model kaum moneteris (*monetarist models*). Menurut teori kuantitas, penyebab inflasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Jumlah uang yang beredar bertambah.
- b. Faktor psikologi Masyarakat, yaitu harapan (ekspektasi) masyarakat tentang kenaikan harga barang atau jasa terhadap timbulnya inflasi.

Apabila masyarakat mempunyai uang dan harapan mengenai harga barang yang tidak naik menjadi kenyataan, maka masyarakat akan menyimpan uangnya. Yang akibatnya, permintaan masyarakat terhadap barang akan berkurang. Sebaliknya, jika masyarakat mempunyai perkiraan tentang harga barang di masa yang akan datang mengalami kenaikan, maka mereka akan terdorong untuk segera melakukan pembelian barang. Kondisi inilah yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga barang yang lebih

cepat. Keadaan ini akan berbeda ketika masyarakat mulai memahami inflasi. Mereka menjadi enggan menyimpan uangnya, sehingga lebih memilih membelanjakkannya.

2.1.5.3 Dampak Negatif Inflasi

Menurut Sukirno (2022), menyatakan bahwa kenaikan harga-harga yang tinggi secara terus-menerus bukan hanya menyebabkan beberapa dampak buruk ke kegiatan ekonomi saja, tetapi juga terhadap kemakmuran individu dan masyarakat. Diantaranya:

1. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan biaya yang terus-menerus membuat kegiatan produksi menjadi kurang menguntungkan, sehingga pemilik modal cenderung beralih menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Misalnya membeli tanah, rumah dan bangunan. Karena pengusaha melakukan perubahan investasi ke aset seperti ini, maka akan menurunkan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya pengangguran.

Kenaikan harga ini juga menyebabkan pengaruh buruk ke perdagangan luar negeri. Produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif di pasar internasional sehingga ekspor menurun. Sebaliknya, harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi yang diakibatkan oleh inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, sehingga impor akan meningkat. Ekspor

yang menurun yang diikuti juga oleh meningkatnya impor menyebabkan ketidakseimbangan aliran devisa dan memperburuk posisi neraca pembayaran.

2. Inflasi dan Kemakmuran Masyarakat

Selain menyebabkan pengaruh buruk terhadap kegiatan ekonomi negara, inflasi juga menyebabkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap individu dan masyarakat:

- a. Inflasi menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat yang berpendapatan tetap. Pada umumnya kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menyebabkan menurunnya upah riil orang-orang yang berpendapatan tetap.
- b. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.
- c. Memperburuk pembagian kekayaan. Penerima pendapatan tetap mengalami penurunan nilai riil pendapatan mereka, dan pemilik kekayaan finansial juga melihat berkurangnya nilai riil asetnya. Akan tetapi pemilik harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan seringkali dapat mempertahankan atau bahkan menambah nilai riil kekayaannya. Sebagian penjual atau pedagang juga mampu menjaga nilai riil pendapatannya. Dengan demikian, inflasi cenderung memperlebar

ketimpangan antara golongan berpendapatan tetap dan pemilik harta tetap serta pedagang.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 1993-2024”. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Research on the Impact of Tax Burden on Entrepreneurial Household Consumption Qiyun Feng (2024)	Variabel Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel inflasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan beban pajak menurunkan pendapatan yang dapat dibelanjakan rumah tangga wirausaha, sehingga mereka menjadi lebih hemat dan cenderung menabung daripada berbelanja. Pola konsumsi berbeda menurut tingkat pajak, dan ketidakpastian kebijakan turut memengaruhi keputusan konsumsi.	Frontiers in Business, Economics and Management/ Vol.16, No. 2,2024
2.	Tax Impact on Household Income Mariyana Pavlova (2016)	Variabel Pajak Penghasilan terhadap Konsumsi Rumah Tangga	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis struktural dan tidak menggunakan variabel inflasi dan PPN.	Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak pajak penghasilan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan disposable rumah tangga, yang berdampak pada kemampuan konsumsi, Tabungan, dan investasi rumah tangga.	Economics and Business, Vol. 29, 2016.
3.	Tax Salience and Household Consumption in	Variabel Pajak Penghasilan	Tidak menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan individu	PoliEcoM Administration Review,

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	China: A Re-examination Based on the Nature of Taxation Zehui Liu (2025)	dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Konsumsi Rumah Tangga	n variabel inflasi.	memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Sebaliknya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi, khususnya pada kebutuhan yang bersifat inelastis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pajak yang secara langsung mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, seperti pajak penghasilan, cenderung menekan konsumsi, sementara pajak yang tertanam dalam harga justru dapat mendorong pengeluaran. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tingkat saliansi pajak atau sejauh mana pajak terlihat oleh konsumen bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi perilaku konsumsi, karena keputusan konsumsi lebih banyak dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia dan harga akhir barang.	Vol. 1 No. 1 (2025)
4.	Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga Menengah: Studi Empiris di Kota Besar Ahmad Wahyudi Zein, Anju Andini, dan Valina Sinka (2025)	Variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga.	Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan tidak menggunakan variabel PPh dan Inflasi.	Hasil menunjukkan bahwa meskipun beban pajak secara keseluruhan pada konsumsi dasar tidak meningkat secara signifikan karena berbagai langkah mitigasi, persepsi publik terhadap kenaikan PPN tetap menyebabkan penurunan pengeluaran terutama pada barang dan jasa non-esensial. Hasil ini menegaskan pentingnya persepsi fiskal dalam memengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Studi ini menyarankan bahwa transparansi fiskal, kampanye kesadaran publik, dan kebijakan kompensasi	Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan Volume 2, Nomor 3, Agustus 2025.

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				sangat penting untuk menjaga daya beli kelas menengah selama pelaksanaan kebijakan peningkatan penerimaan pajak nasional.	
5.	Pengaruh Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga daam Model Makroekonomi Raden Ai Lutfi Hidayat (2026)	Variabel Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan tidak menggunakan variabel inflasi.	Hasil menunjukkan Pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdampak langsung dengan menaikkan harga barang dan jasa. Sebaliknya, pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan (PPh), mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan secara bertahap. Selain itu, dampak pajak terhadap konsumsi berbeda sesuai dengan kelompok pendapatan: rumah tangga dengan MPC (Marginal Propensity to Consume) yang rendah lebih rentan terhadap kenaikan pajak daripada rumah tangga dengan MPC yang tinggi.	Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10, NO. 1 Tahun 2026
6.	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Perilaku Konsumsi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia . Hajatina & Uswatun Hasanah (2024).	Variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Konsumsi Rumah Tangga.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tidak menggunakan variabel PPh dan Inflasi.	Hasil menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN meningkatkan harga barang dan jasa, menekan daya beli terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta melemahkan konsumsi rumah tangga. Meski bertujuan memperkuat penerimaan negara, kebijakan ini berisiko menurunkan kesejahteraan.	Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol.3, No. 2
7.	Dampak Regulasi PPN terhadap Layanan Digital terhadap Perilaku Konsumsi dan Beban Konsumsi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah-Menengah.	Variabel Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Konsumsi Rumah Tangga	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain exlanatory survey dan tidak menggunakan variabel	Hasil menunjukkan bahwa kenaikan harga akibat PPN secara signifikan menurunkan penggunaan layanan digital hiburan dan pesan- antar makanan, tetapi berdampak kecil pada layanan esensial seperti internet dan aplikasi pendidikan. Beban konsumsi meningkat lebih besar pada	Maksiora: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Kewirausah aan Vol. 1, No. 1.

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sitti Rahma Sudirman, Ardhiatul Halima Tuasalamony, Muh Ainul Yaqin, Rahadian Cahyadi, Melsa Jumliana (2025).		PPh dan Inflasi.	rumah tangga berpendapatan rendah 6,8 dibanding menengah 3,1%.	
8.	Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. Vita Sarasi, Khairul Anwar, Afrizal Fadillah (2025).	Variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dan tidak menggunakan variabel PPh dan Inflasi.	Hasil menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga turun 1,6%, dan investasi 2,7% akibat tekanan ekonomi, disertai penurunan daya beli masyarakat. Namun, instrumen syariah seperti zakat dan wakaf produktif berpotensi menstabilkan ekonomi, dengan simulasi menunjukkan kenaikan konsumsi 0,8%, investasi 0,9%, dan belanja pemerintah 1%.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 11, No.02
9.	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Keluarga Penerima Manfaat, dan Analisis Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia Dengan Regresi Kuantil. Asih Murwiati & Ricky Zulkarnain (2023)	Variabel Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Penelitian ini menggunakan regresi kuantil dan tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang memengaruhi konsumsi rumah tangga secara signifikan, yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah keluarga penerima manfaat. Pada analisis metode regresi kuantil ketika daerah dengan konsumsi rumah tangga terendah maka jumlah keluarga penerima manfaatnya tinggi tetapi PDRB-nya rendah, begitu sebaliknya ketika wilayah tersebut berada di kelompok dengan konsumsi rumah tangga terbesar maka wilayah tersebut memiliki PDRB yang besar tetapi jumlah keluarga penerima manfaatnya sedikit. Kemudian variabel inflasi terhadap konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan.	Innovative: Journal Of Science Research. Vol.3, No.2 Tahun 2023 Page 8631-8643.

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Anita Yuliana Rizki (2022)	Variabel Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Artinya apabila PDRB mengalami peningkatan maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Artinya apabila inflasi mengalami peningkatan maka pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menurun.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 10 No. 2
11	Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Perkapita terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Aceh. Fanny Nailufar, Miftahul Jannah, dan Reza Juanda (2022)	Variabel Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Aceh. Sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Aceh. Secara simultan, inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga Provinsi Aceh	Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)- Vol. 2 No. 2 (2022) pp. 140-147
12	Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Inflasi serta Suku Bunga terhadap Konsumsi Rumah Tangga Makanan dan Non Makanan serta Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Daru Yudanto, Eny Rochaida,	Variabel Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Temuan penelitian ini adalah pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan serta dominan terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan. Suku bunga berpengaruh positif dan kurang signifikan terhadap konsumsi rumah tangga makanan dan non makanan. Konsumsi rumah tangga makanan berpengaruh negatif dan kurang signifikan	Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 17 No. 2 (2020): Agustus

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Priyagus (2020)			terhadap kesejahteraan masyarakat. Konsumsi rumah tangga non makanan berpengaruh positif dan signifikan serta dominan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita melalui konsumsi rumah tangga non makanan berpengaruh dominan terhadap kesejahteraan masyarakat.	
13	Analisa Hubungan antara Konsumsi Rumah Tangga dan Tingkat Inflasi Indonesia (Uji Kausalitas Granger)	Variabel Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga	Menggunakan Uji Kausalitas Granger dan tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Berdasarkan hasil pengujian statistik, disimpulkan bahwa data yang digunakan stasioner pada selisih ke-2 dan memiliki kointegrasi 1 arah dengan nilai statistik trace pada angka 'none', lebih besar dari nilai kritis (22,86612 > 15,494471) pada interval kepercayaan di bawah 0,05. Hasil uji Granger menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memengaruhi laju inflasi di Indonesia.	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 1, Januari 2020
14	Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Perkapita terhadap Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Utara Zackya Hayati Lubis (2025)	Variabel Inflasi Terhadap Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil menunjukkan bahwa secara Bersama-sama inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Secara parsial, pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh yang dominan dan konsisten terhadap konsumsi rumah tangga. yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut menjelaskan 99,39% variasi dalam konsumsi rumah tangga. Meskipun dampak inflasi biasanya tidak langsung, penelitian ini menekankan bahwa pendapatan perkapita memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong perilaku konsumsi rumah tangga.	Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.6 Juni 2025

NO.	Judul, Penulis dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	The Effect on Inflation on Household Expenditures Tacinur AKCA (2023)	Variabel Inflasi terhadap Pengeluaran Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga dan pinjaman pribadi tidak memengaruhi inflasi secara simetris. Namun, peningkatan pinjaman pribadi dapat menurunkan inflasi, sedangkan peningkatan pengeluaran rumah tangga dapat menyebabkan fluktuasi inflasi ke arah positif maupun negatif.	YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl: 2025 Cilt:32 Sayı:1
16	Impact of Inflation and Per Capita Income On Consuption Expenditure In Ecowas, Ogunbadejo Hussain Kehinde, Wakila Olabisi Balogun, And Agbabiaka Kamor Oladimeji (2025)	Variabel Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Tidak menggunakan variabel PPh dan PPN.	Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan kointegrasi antara PDB per kapita, tingkat inflasi, dan pengeluaran konsumsi. Dalam jangka panjang, konsumsi dipengaruhi secara positif oleh inflasi dan pendapatan di delapan negara ECOWAS, sementara dalam jangka pendek, inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan pengeluaran konsumsi. Studi ini merekomendasikan agar pemerintah mengendalikan inflasi dan mendorong ekspansi ekonomi, bank sentral dan otoritas fiskal harus bekerja sama, dan para pembuat kebijakan harus membuat rencana stimulus atau keringanan pajak yang akan meningkatkan pengeluaran dan memacu ekspansi ekonomi.	Journal of Economics and Allied Research, Vol. 10 No. 2 (2025)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang dipergunakan serta memiliki fungsi sebagai pengorganisir serta menghubungkan berbagai ide, teori, fakta, observasi dan kajian literatur dalam sebuah tulisan atau penelitian. Berikut penulis akan menyajikan kerangka pemikiran penelitian yang berjudul “Pengaruh

Pajak dan Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia Tahun 1993-2024”.

2.2.1 Hubungan PPh dengan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam teori konsumsi Keynes, konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan disposabel yang dirumuskan sebagai $C = C_0 + bY_d$. Karena pendapatan disposabel merupakan pendapatan setelah pajak $Y_d = Y - T$, maka fungsi konsumsi dapat dirumuskan sebagai $C = C_0 + b(Y - T)$. Pajak penghasilan berperan dalam mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh rumah tangga. Ketika beban pajak penghasilan meningkat, maka pendapatan setelah pajak menjadi lebih kecil sehingga kemampuan rumah tangga untuk melakukan konsumsi cenderung menurun. Sebaliknya, penurunan beban pajak penghasilan dapat meningkatkan pendapatan disposabel yang mendorong kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pandangan tersebut sejalan dengan literatur ekonomi menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan, sehingga dapat memengaruhi pola belanja konsumen (Rhamadhani, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian Liu et al., (2025) yang menjelaskan bahwa perubahan pada kebijakan pajak, termasuk potongan atau tambahan beban pajak, berpengaruh langsung terhadap konsumsi masyarakat. Ketika beban pajak meningkat, maka pendapatan yang tersisa setelah dipotong pajak menjadi lebih kecil, sehingga konsumsi rumah tangga cenderung menurun. Sebaliknya, ketika beban pajak menurun, maka dapat meningkatkan daya beli rumah tangga yang akan mendorong kenaikan konsumsi.

2.2.2 Hubungan PPN dengan Konsumsi Rumah Tangga

Teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro, konsumen berusaha memaksimalkan utilitas dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga garis anggaran konsumen bergeser ke dalam dan daya beli riil menurun. Kondisi ini membuat jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, secara teoritis hubungan antara PPN dan konsumsi bersifat negatif, di mana peningkatan PPN akan menurunkan tingkat konsumsi. Pengaruh ini cenderung lebih besar pada barang dengan elastisitas permintaan tinggi, seperti barang non-esensial, karena konsumen lebih mudah mengurangi pembelian atas barang tersebut ketika harga meningkat.

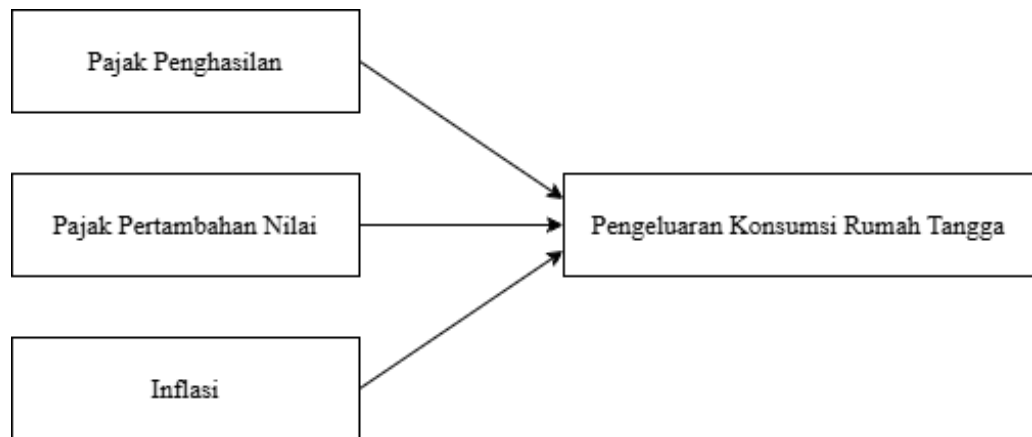
Hal ini sejalan dengan penelitian Hajatina & Hasanah, (2024) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN meningkatkan harga barang dan jasa, menekan daya beli terutama masyarakat berpenghasilan rendah, serta melemahkan konsumsi rumah tangga. Didukung penelitian Hidayat, (2026) yang menyatakan bahwa pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai berdampak langsung dengan menaikkan harga barang dan jasa.

2.2.3 Hubungan Inflasi dengan Konsumsi Rumah Tangga

Dalam perspektif Rational Choice Theory yang dikembangkan oleh Gary S. Becker (1976), menyatakan individu diasumsikan bertindak rasional dalam mengambil keputusan ekonomi dengan tujuan memaksimalkan utilitas (kepuasan). Setiap keputusan konsumsi dilakukan melalui pertimbangan antara biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh, dengan mempertimbangkan

berbagai alternatif yang tersedia. Dalam konteks inflasi, kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan meningkatkan biaya konsumsi yang harus ditanggung oleh rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan daya beli riil masyarakat menurun, sehingga konsumen akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya. Rumah tangga cenderung mengurangi jumlah pembelian, menunda konsumsi, atau beralih ke barang substitusi yang lebih terjangkau guna mempertahankan tingkat kepuasan yang optimal sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Dengan demikian, berdasarkan teori pilihan rasional, inflasi secara teoritis berpengaruh negatif terhadap konsumsi rumah tangga, karena kenaikan harga mendorong masyarakat untuk menekan pengeluaran demi menjaga keseimbangan antara biaya dan manfaat dalam proses pengambilan keputusan konsumsi. Hal ini sejalan dengan penelitian Nailufar et al., (2022) yang menunjukkan bahwa inflasi mempunyai hubungan negatif terhadap konsumsi rumah tangga, artinya ketika inflasi mengalami peningkatan maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan menurun. Dan penelitian Kudadiri & Sinaga (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan inflasi memiliki dampak yang signifikan pada konsumsi rumah tangga yang lebih rendah, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang paling berdampak. Sementara kelompok berpendapatan tinggi lebih mudah beradaptasi. Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu dari Rizki (2022), Yudanto et al.,(2022), Kahinde et al., (2025).



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan untuk menjawab suatu masalah penelitian. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris, yang artinya dapat dibuktikan dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diuji kebenarannya dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa secara parsial pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Diduga bahwa secara simultan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang.